

ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN NEGARA FEDERASI RUSIA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

**Irwan Fathurrochman¹, Sudarwan Danim², Syaiful Anwar AB³, Nina Kurniah⁴, Connie⁵, Wachidi⁶,
Dina Hajja Ristianti⁷**

Email : irwan@iaincurup.ac.id

^{1,7}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

^{2,3,4,5,6} Universitas Bengkulu

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pendidikan Negara Federasi Rusia dan dilakukan implementasi pada sistem pendidikan di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat banyak perbedaan dalam sistem pendidikan. Struktur kurikulum pendidikan dasar di Negara Federasi Rusia memiliki jam lebih banyak per minggu dibandingkan di Indonesia, tetapi dalam satu tahun waktu studi di Rusia lebih pendek daripada Indonesia. Sistem penilaian hasil belajar di Rusia dan di Indonesia memiliki kesamaan, yaitu berfungsi sebagai dasar informasi untuk menentukan kompetensi yang telah diperoleh peserta didik, bukan sebagai ukuran untuk mengelompokkan peserta didik ke dalam kelompok. Indonesia memiliki manajemen pendidikan yang lebih baik, yang mampu mengelola seluruh sumber daya pendidikan oleh beberapa orang dalam satu sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara makro atau mikro. Negara Federasi Rusia memandang bahwa pengelolaan pendidikan merupakan hal yang penting dalam sebuah pengelolaan lembaga pendidikan. Negara Indonesia mengelola isu-isu dalam pengelolaan pendidikan secara umum menjadi empat pokok fokus manajemen pendidikan, yakni mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan layanan pendidikan bermutu, relevansi, efektivitas dan efisiensi.

Kata Kunci: Sistem Pendidikan, Negara Federasi Rusia, Mutu Pendidikan Indonesia

Abstract: This study described the education system of the Russian Federation and its implementation in the education system in Indonesia. The results of the study show that there are many differences in the education system. The structure of the basic education curriculum in the Russian Federation has more hours per week than in Indonesia, but in one year the study time in Russia is shorter than in Indonesia. The assessment system for learning outcomes in Russia and Indonesia has something in common, namely that it functions as a basis of information to determine the competencies that have been obtained by students, not as a measure for classifying students into groups. Indonesia has better education management, which is able to manage all educational resources by several people in one education system to achieve educational goals both macro and micro. The State of the Russian Federation views that the management of education is an important matter in the management of educational institutions. The Indonesian state manages issues in education management in general into four main focuses of education management, namely the quality of education, expansion and equity of quality education services, relevance, effectiveness and efficiency.

Keywords: Education System, Russian Federation, Indonesian Education Quality

Pendahuluan

Pendidikan secara umum diartikan sebagai upaya mengembangkan kualitas pribadi manusia dan membangun karakter bangsa yang dilandasi nilai-nilai agama, filsafat, psikologi, sosial, budaya, dan iptek yang bermuara pada pembentukan manusia bermoral dan berahlak mulia serta berbudi luhur (Abraham, 1999).

Menurut Baharuddin (2010) setiap bangsa pasti memiliki system pendidikan, melalui system pendidikan itu, suatu bangsa dapat memelihara dan mempertahankan nilai-nilai luhur serta

keunggulan-keunggulan mereka dari generasi ke generasi.

Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Namun, sistem pendidikan nasional masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga saat ini Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan sesama anggota negara ASEAN pun kualitas SDM bangsa Indonesia termasuk dalam peringkat yang paling rendah (Bhutankar, 2000). Hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia

belum dapat berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus segera diperbaiki agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang supaya bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain dan agar tidak semakin tertinggal karena arus global yang berjalan cepat (Chaube, S.P & Chaube, A. 1993). Dengan demikian di dalam makalah ini akan membahas perbandingan sistem pendidikan negara Indonesia dengan sistem pendidikan negara Rusia yang bertujuan untuk menganalisa sumber-sumber atau faktor-faktor yang menyebabkan kelebihan-kelebihan dari masing-masing sistem pendidikan (Devidson, 1989).

Sejalan dengan tumbuhnya ilmu-ilmu sosial pada akhir abad 19 yang dalam perkembangan pesatnya kemudian tertuju perhatiannya pada pengakuan adanya hubungan yang dinamis antara pendidikan dengan masyarakat atau negara tertentu (Education in The Russian Federation. 2005). Pendidikan dipandang sebagai cerminan dari suatu masyarakat atau bangsa, dan sebaliknya suatu masyarakat atau bangsa dibentuk oleh sistem pendidikannya (Fattah, 2013).

Dalam rangka pemenuhan tuntutan perkembangan zaman, maka lembaga pendidikan dewasa ini juga melakukan suatu penilaian atau evaluasi diri dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang dikenal dengan akreditasi sekolah yang dilaksanakan oleh satu badan yang bernama Badan Akreditasi Nasional, dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi (General Overview of the Structure of Russian Education System. 2011).

Menurut data dari Unesco (2019) Rusia sebagai salah satu Negara yang dahulu merupakan kekuatan terbesar di dunia (saat menjadi bagian Uni Soviet) sekarang ini mengalami ketertinggalan dari berbagai Negara eropa lainnya dan Negara yang dulunya saling bersaing dengan Rusia. Berdasarkan data Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNESCO Rusia berada pada urutan ke – 71 sedangkan Indonesia berada pada urutan 111, namun dari segi peringkat Education Development Index (EDI) yang dirilis oleh UNESCO, Rusia berada pada urutan ke 45 (UNESCO. 2011).

Dari data tersebut terlihat bahwa Negara Rusia sangat memperhatikan tingkat perkembangan pendidikannya. Sementara untuk Indonesia antara peringkat HDI dan EDI relative sama yaitu 111 dan 109. Sebagai salah satu bagian tugas dalam menempuh Kuliah Perbandingan Pendidikan Antar Negara maka kami melakukan kajian Sistem Pendidikan di Negara Rusia. Besar

harapan kami dengan menyajikan makalah ini, kita mendapat gambaran bagaimana pengelolaan pendidikan di Rusia, sebagai salah satu referensi dalam mengelola lembaga pendidikan, sehingga kita dapat mengambil sisi positif untuk mengembagakan Pendidikan di Indonesia (General Overview of the Structure of Russian Education System. 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan melakukan pengkajian literatur literatur dari buku dan jurnal-jurnal baik dalam maupun luar negeri yang terkait dengan sistem pendidikan pada negara federasi rusia dan sistem pendidikan di Negara Kesatuan republic Indonesia. Peneliti melakukan pengumpulan data yang terkait dengan seluruh sistem pendidikan pada kedua Negara, kemudian melakukan analisis mendalam dan hasil analisis diinterpretasikan dalam bentuk narasi ilmiah sebagaimana dalam hasil dan pembahasan berikut ini (Kristiawan. 2017).

Pembahasan

Profil Negara Federasi Rusia

Negara Federasi Rusia adalah sebuah negara yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia. Dengan wilayah seluas 17.075.400 km², Rusia adalah negara terbesar di dunia. Wilayahnya kurang lebih dua kali wilayah Republik Rakyat Cina (Tiongkok; RRT), Kanada atau Amerika Serikat. Penduduknya menduduki peringkat ketujuh terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brasil, dan Pakistan (Ginandjar. 1993).

Negara ini dahulu pernah menjadi negara bagian terbesar Uni Soviet. Rusia adalah ahli waris utama Uni Soviet; negara ini mewarisi 50% jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah, dan kurang lebih 50% aset-aset ekonomi dan persenjataannya (Hellen, C.R. 2001).

Saat ini Rusia berusaha keras untuk meraih status sebagai negara adidaya lagi. Meskipun Rusia adalah negara penting, tetapi statusnya masih jauh dibandingkan dengan status Uni Soviet dulu (Herabuddin. 2009).

Pendidikan di Rusia disediakan oleh negara dan diatur oleh Departemen Pendidikan Federal. Daerah mengatur pendidikan mereka dalam yurisdiksi yang berlaku dalam kerangka undang-undang federal. Pada tahun 2004 belanja negara untuk pendidikan sebesar 3,6% dari APDB, atau 13% dari anggaran negara konsolidasi (Khairudin. 2017).

Sistem pendidikan di Rusia meliputi taman kanak-kanak (playgroup, sejak usia bayi 1 tahun sampai taman kanak-kanak lanjut sejak usia 3

tahun), sekolah menengah (sejak usia 6 tahun), "gimnasium" (semacam sekolah menengah dengan kurikulum yang lebih luas), sekolah dan sekolah kejuruan, perguruan tinggi (institut, universitas dan akademi).

Sekolah menengah terdiri dari 4 tahun sekolah dasar, 5 tahun sekolah menengah utama dan 2 tahun sekolah menengah penuh / kejuruan. Ada sekolah menengah khusus di mana mata pelajaran tertentu diutamakan, misalnya bahasa, matematika, fisika dan lain-lain. Sejumlah perguruan tinggi mengikuti sistem Barat dan mempunyai dua peringkat: BA (4 tahun) dan MA (2 tahun) tetapi kebanyakannya tetap sesuai sistem lama yaitu tanpa gelar BA dan MA (para tamatan diberi kualifikasi saja, misalnya guru sekolah, penerjemah, insinyur dan lain-lain) dengan tempo pelajaran 5-6 tahun. Jumlah universitas negeri (1994) ialah lebih dari 40, disertai 80 universitas khusus (teknik, medis, keguruan, pertanian) yang dulu bertaraf institut saja dan lebih dari 30 universitas swasta.

Filosofi Pendidikan

Mengacu kepada Undang-undang Pendidikan yang disahkan oleh Parlemen Rusia pada tahun 1992, ada enam prinsip kebijakan Negara mengenai pendidikan, yaitu : (1) Pendidikan yang bercirikan kemanusiaan dan prioritas nilai-nilai umum kemanusiaan. (2) Kesatuan budaya dan fasilitas pendidikan dalam Federasi. (3) Akses pendidikan bagi seluruh rakyat. (4) Pendidikan bebas dari pengaruh agama (church-free) pada lembaga-lembaga pendidikan Negara. (5) Kebebasan dan pluralisme dalam pendidikan. (6) Manajemen yang demokratis dalam pendidikan dan otonomi lembaga-lembaga pendidikan. (7) Membaca undang-undang tersebut dapat kita simpulkan bahwa filosofi pendidikan yang dianut oleh negara Rusia adalah Filsafat Humanisme yang tetap berdasar kepada Liberalisme yang berakar kepada Fahaman Komunisme (Kristiawan. 2018).

Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan yang terdapat di Rusia, dapat di lihat pada data sebagaimana berikut :

(a) Pendidikan Pra-Sekolah

Pendidikan Prasekolah dinamakan dengan playgroup dimulai dari usia 1-3 tahun. kemudian, dilanjutkan dengan taman kanak-kanak (TK) untuk usia 3-6 tahun. Pendidikan seperti sekolah, dan diselenggarakan oleh daerah atau pemerintah setempat (Kristiawan. 2018).

(b) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan pendidikan wajib yang diselenggarakan oleh Negara. Pendidikan dasar berlangsung selama 9

tahun dengan dua tingkatan yaitu 4 tahun sekolah dasar dan 5 tahun sekolah menengah utama (Kristiawan. 2019).

(c) Pendidikan Lengkap Sekunder dan Kejuruan

Setelah menyelesaikan dasar, para siswa memiliki dua pilihan. Apakah ingin melanjutkan kejenjang pendidikan lengkap sekunder atau kejuruan. Pada pendidikan lengkap sekunder, siswa harus menyelesaikan pendidikan selama dua tahun untuk mendapat sertifikat. Setelah itu siswa dibenarkan untuk masuk kejenjang perguruan tinggi/universitas dengan sertifikat yang diperolehnya (Fathurrochman. 2019).

(d) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi dirusia dapat diikuti oleh lulusan dari pendidikan lengkap sekunder ataupun lulusan dari kejuruan, jenjang pendidikan tinggi adalah sebagai berikut : (1) Tingkat universitas tahap pertama: tahap pertama terdiri dari paling sedikit dua tahun dari program studi pendidikan tinggi. (2) Pendidikan tinggi dasar atau disebut bakalaur adalah pendidikan setingkat sarjana dirusia, yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 4 tahun. (3) Pendidikan tingkat selanjutnya bagi lulusan bakalaur adalah program Engineer atau program magester. Harus menyelesaikan pendidikan tahunan. (4) Magester diberikan peluang untuk meneruskan program kandidat Nauk/Aspirantura, ini merupakan jenjang pendidikan setingkat doktoral, selama kurang lebih 3 tahun. Dan akan diberikan gelar Ph.D atau Doktor. (5) Pendidikan tingkat tertinggi atau setingkat profesor di Indonesia biasa ditempuh oleh doktor/ kandidat Nauk selama jangka waktu tidak tetap. Ini merupakan gelar ilmiah yang diberikan setelah adanya persiapan ilmiah umum dan mendapat pembelaan dari permohonan.

Implementasi sistem pendidikan negara federasi Rusia dalam meningkatkan mutu Pendidikan Indonesia

Beberapa hal yang menjadi isi kebijakan dan pengaruh positif untuk di implementasikan di Indoneisa dari hasil perbandingan sistem pendidikan dari kedua Negara adalah sebagaimana berikut:

(a) Peningkatan Mutu Pendidikan

Pemerintah daerah harus terus mendorong dan mengembangkan sekolah menerapkan konsep "Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah" (MPMBS) yakni usaha peningkatan mutu pendidikan dengan menggalang segala sumber daya yang ada di sekolah dan lingkungannya, baik guru, orangtua siswa, pemerintah setempat maupun swasta agar terkoordinasi dan terencana dalam

menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya.

(b) Perluasan Kesempatan Belajar

Dalam rangka mempercepat penuntasan program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan maka dapat ditempuh usaha baru sebagai berikut : (1) Pembangunan Unit Sekolah baru (USB). (2) Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB). (3) Pemasayarakatan SLTP Terbuka (SLTPT). (4) Kampanye/Penyuluhan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. (5). Pemberian Beasiswa dan dana bantuan Operasional (DBO). (6). Pendidikan bagi SD/MI, SLTP/MTs dan SMU/MA. (7) Pemberian Dana Operasional Pendidikan bagi SD/MI. (8) Pemberian bantuan perlengkapan belajar bagi siswa SD/MI dari keluarga tidak mampu. (9) Membina dan mendorong penyelenggaraan pendidikan luar sekolah oleh masyarakat dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar (yang menyelenggarakan Paket A, Paket B, dan Paket C).

(c) Efisiensi dan Efektivitas

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan efektif maka penyelenggara pendidikan formal perlu dibekali dengan pengetahuan tentang : (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Administrasi Sekolah. (2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Administrasi Perkantoran. (3) Kemampuan manajerial. (4) Kemampuan Pengelola Proyek. (5) Pengelolaan dan perencanaan pendidikan. (6) Kemampuan Monitoring dan Evaluasi.

(d) Menyusun Peraturan Daerah Pendidikan

Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan di Kabupaten/Kota merupakan dasar hukum yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten/Kota tersebut sebagai kelanjutan dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003. Bertolak dari aturan ini maka beberapa kebijakan meso maupun mikro dapat dibuat dalam rangka menjalankan amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 45.

(e) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pendidikan (*Education Index*) partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan harus terus dipacu. Berdasarkan laporan BPS diketahui bahwa Angka RLS masyarakat Jawa Barat hanya 6,8 tahun atau setara dengan siswa SMP Kelas satu. Dengan demikian diperlukan perjuangan yang sangat erat bagi dinas pendidikan untuk meningkatkan wajib belajar 9 tahun. Padahal wajib

belajar 9 tahun sudah dikumandangkan sejak lama. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pendidikan dasar, baik melalui SD/MI dan SMP/MTs, maupun SMP Terbuka, dan Paket A dan B untuk dapat mengakselerasi Wajar Dikdas 9 tahun.

(f) Angka Melek Huruf

Penopang lain dari Indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH). Semula kita menduga bahwa di Kabupaten/Kota di Jawa Barat sudah tidak ada lagi yang masih Buta Huruf (tidak bisa baca-tulis-bicara bahasa Indonesia), namun setelah dilakukan pendataan ulang di Jawa Barat telah diketahui terdapat sekitar 251.234 yang masih kurang dalam baca-tulis-bicara bahasa Indonesia. Tentu saja, mereka harus segera diantarkan melalui program yang fungsional (Keaksaraan Fungsional).

(g) Partisipasi dan Peran serta Masyarakat

Pada Pasal 56 UUSPN 20/2003 diungkapkan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan melalui dewan pendidikan, komite sekolah atau madrasah. Sebagaimana diketahui bahwa Dewan Pendidikan di Kabupaten/Kota pada umumnya belum banyak dirasakan perannya dalam peningkatan mutu pendidikan di kabupaten/kota, bahkan dalam proses pembentukannya pun dikuasai pihak-pihak tertentu yang kurang menguasai masalah pendidikan. Demikian pula dengan Komite Sekolah/Madrasah, di antara mereka masih kurang memiliki pemahaman yang mantap tentang MBS dan bahkan ada di antara mereka yang hanya berfungsi sebagai stempel bagi sekolah dalam melegitimasi pungutan dari orangtua siswa.

(h) Otonomi Sekolah

Dalam menjalankan MBS, sekolah memiliki otorita dalam mengelola pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Sekolah diberi kewenangan untuk mengelola input pendidikan, melaksanakan proses pembelajaran, dan melakukan evaluasi hasil pendidikan. Namun, dalam beberapa hal pemerintah daerah harus melakukan pengawasan secara ketat untuk memberikan jaminan kualitas layanan yang diberikan sekolah kepada peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme sistem kontrol yang akurat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Sistem kontrol itu, bukan penyeragaman buku laporan pendidikan atau melakukan Ulangan Umum Bersama melainkan menciptakan suatu mekanisme yang sah.

(i) Kualitas SDM Pendidikan

Dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan, tentu saja harus diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Harus diakui bahwa tenaga kependidikan yang saat ini tersedia merupakan produk dari LPTK yang belum mengantisipasi reformasi dalam bidang pendidikan. Dalam beberapa hal para guru masih menggunakan paradigma *transfer of knowledge* dalam penyelenggaraan pendidikan. Padahal pola pikir ini telah lama ditinggalkan oleh kalangan inovator pendidikan. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang masih hanya berfungsi sebagai guru, menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Konsep *learning based experience* dan *learning by doing* masih belum secara mantap diterapkan para guru. Apalagi konsep dasar pengembangan kompetensi yang seharusnya dijadikan dasar bagi pengembangan kurikulum di sekolah.

(j) Kesejahteraan Tenaga Kependidikan

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan kinerja tenaga kependidikan salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesejahteraan yang diterima (*take home pay*). Dari gaji yang diterima para guru, mereka harus rela membagi penggunaannya dengan biaya transportasi dan konsumsi (terutama jika harus mengajar sampai dengan siang). Dengan demikian *take home pay* yang diterima para guru semakin kecil dan tidak manusiawi. Berbeda dengan profesi lain, untuk keperluan transportasi dan konsumsi biasanya tersedia pada institusi tersebut, sedangkan profesi guru harus merogoh saku gajinya. Dalam menyikapi hal ini, tampaknya pemerintah daerah harus segera memikirkan “insentif” atau tunjangan profesi yang dapat diberikan kepada guru agar kinerja mereka meningkat dalam rangka mempersiapkan SDM pendidikan di Kabupaten/Kota yang lebih baik. Pada daerah-daerah tertentu, hal ini sudah dilaksanakan, misalnya Kota Bandung, DKI Jakarta, Kutai Kertanegara, Propinsi Sumatera Barat, dan sebagainya. Mungkin jika Anggaran Pendidikan di Kabupaten Ciamis dapat diungkit hingga 20%, para guru dapat segera diberi insentif supaya memacu mereka dalam berkompetensi meningkatkan mutu pendidikan.

(k) Organisasi Penjamin Kualitas

Untuk melakukan jaminan kualitas pendidikan di Kabupaten/Kota, tampaknya diperlukan organisasi kedinasan, setara dengan eselon III yang membidangi peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan. Lembaga ini harus mampu memberikan jaminan kualitas hasil

pendidikan dan melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap tenaga kependidikan. Sudah tidak sesuai lagi apabila lembaga penjamin kualitas pendidikan yang memberikan pelatihan kepada tenaga pendidikan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Lembaga ini dapat berfungsi melatih dan membina tenaga pemerintah daerah, namun untuk tenaga kependidikan harus dilaksanakan secara khusus agar dapat memberikan pelatihan terhadap tenaga kependidikan (guru) mengarah kepada profesionalisasi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan, lembaga ini perlu mengundang *educational expert* dari Lembaga Pendidikan Tinggi Tenaga Kependidikan.

(l) Penggunaan Buku Teks Pelajaran

Ketentuan tentang Buku Teks Pelajaran sebagaimana dituangkan dalam Permen 11/2005 masih belum diterapkan secara menyeluruh di sekolah. Berdasarkan ketentuan itu, Sekolah (guru dan kepala sekolah) dan Komite Sekolah dilarang menjual buku di sekolah. Demikian pula, penerbit tidak boleh menjual buku langsung ke sekolah. Untuk keperluan peserta didik, para guru dapat menganjurkan kepada orangtua atau peserta didik untuk menggunakan buku Teks Pelajaran yang telah berstandar nasional. Pemerintah telah menyampaikan kebijakan tentang Buku Teks Pelajaran, bahwa Pemerintah Pusat tidak akan lagi menerbitkan atau membagikan Buku Teks Pelajaran untuk sekolah. Pemerintah hanya menetapkan buku-buku berstandar nasional yang dapat dipilih oleh sekolah untuk digunakan sebagai buku teks pelajaran di sekolah. Dalam memilih buku ini, sekolah harus mengajak dan melibatkan Komite Sekolah (sebagai wakil masyarakat). Kenyataan di lapangan, masih ada sekolah atau guru menjual paksa buku kepada siswa, menjual LKS kepada siswa, penerbit masih mengedrop buku ke sekolah, penentuan buku teks pelajaran tidak mengajak komite sekolah. Masih banyak persoalan tentang buku teks ini, mungkin karena *low enforcement* yang masih lemah di daerah, serta kesadaran masyarakat yang masih lemah.

(m) Pengembangan Kurikulum Sekolah

Kebijakan pemerintah yang terbaru, tahun 2006, yaitu Permen 22 tentang Standar Isi dan Permen 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permen 24 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan masih sangat multi tafsir. Banyak di antara tenaga kependidikan menyebutnya dengan Kurikulum 2006, padahal dalam ketentuan itu diungkapkan bahwa kurikulum itu harus disusun oleh sekolah dengan

mengikuti sertakan komite sekolah. Ada pula yang menyebutnya dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), padahal itu peristilah yang diberikan bagi kurikulum tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, sekolah harus mengembangkan kurikulumnya, sehingga kelak akan ada Kurikulum SD Negeri 8 Jatinagara atau Kurikulum SMP Ma'arif Banjarsari. Dalam tataran kebijakan, pemerintah daerah harus dengan segera menyusun rambu-rambu pengembangan KTSP sehingga dapat dijadikan acuan pengembangan kompetensi lokal yang harus dikembangkan di daerah. Oleh karena itu, tampaknya masih sangat diperlukan sosialisasi secara mantap dan menyeluruh bagi tenaga kependidikan di daerah, sehingga pengembangan kurikulum dapat mulai dipersiapkan oleh semua pihak dengan mengikutsertakan pakar di daerah yang menguasai bidang ini.

Bertolak dari kenyataan masih banyak persoalan yang dihadapi serta masih banyak pekerjaan bidang pendidikan yang belum diimplementasikan, tampaknya perlu segera kita kaji kembali secara saksama. Mungkinkah konsep desentralisasi pendidikan ini masih menyiratkan berbagai persoalan atau mungkin pula kita yang salah dalam menafsirkan dan memahaminya. Akan sangat bijak, apabila kita coba berpikir dengan jernih, bahwa pendidikan adalah sebuah investasi jangka panjang dalam mempersiapkan SDM yang unggul dan kompetitif. Pendidikan merupakan proyek masa depan mempersiapkan bangsa berkualitas. Oleh karena itu, sebaiknya marilah kita memposisikan diri pada fungsi, kewenangan, dan peran masing-masing sesuai kemampuan dan kompetensi dalam pendidikan. Perencanaan pendidikan di Kabupaten/Kota memerlukan kesungguhan dan peranserta dari berbagai pihak, karena pendidikan merupakan sektor yang telah diotonomkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Berbagai kebijakan pendidikan terkini, tampaknya harus segera diakses oleh semua pelaku pendidikan agar kita tidak tertinggal dengan kebijakan makro maupun kebijakan mikro dalam bidang pendidikan.

Rumusan Solusi Implementasi Terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia

Penulis memberikan solusi implementasi terbaik dalam pengelolaan pendidikan berdasarkan kepada perbandingan sistem pendidikan Negara Federasi Rusia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan formulasi Model Perencanaan, berikut gambaran mengenai tahap-tahap perencanaan pendidikan yang dapat dilaksanakan. Alur berfikir dan tahapan tahapan dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini.

(a) Melakukan analisis lingkungan strategis.

Lingkungan strategis adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan kabupaten/kota, misalnya: Propeda, Renstrada, Repetada, peraturan perundangan (UU, PP, Kepres, Perda, dsb), tingkat kemiskinan, lapangan kerja, harapan masyarakat terhadap pendidikan, pengalaman-pengalaman praktek yang baik, tuntutan otonomi, tuntutan globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan lingkungan strategis harus diinternalisasikan ke dalam perencanaan pendidikan kabupaten/kota agar perencanaan tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategis.

(b) Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan saat ini (dalam kenyataan) yang meliputi profil pendidikan kabupaten/kota (pemerataan, mutu, efisiensi, dan relevansi), pemetaan sekolah/ guru/ siswa, kapasitas manajemen dan sumber daya pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah, dan best practices pendidikan saat ini.

(c) Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang yang dituangkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan, yang mencakup setidaknya pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan kapasitas pendidikan kabupaten/kota.

(d) Mencari kesenjangan antara butir (2) dan butir (3) sebagai bahan masukan bagi penyusunan rencana pendidikan keseluruhan yang akan datang (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Kesenjangan/tantangan yang dimaksud mencakup pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi dan pengembangan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten dan sekolah.

(e) Berdasarkan hasil butir (4) disusunlah rencana kegiatan tahunan untuk selama 5 tahun (rencana strategis) dan rencana kegiatan rinci tahunan (rencana operasional/renop).

(f) Melaksanakan rencana pengembangan pendidikan kabupaten/kota melalui upaya-upaya nyata yang dapat meningkatkan pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, relevansi dan kapasitas manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah.

Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana dan melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pendidikan. Hasil evaluasi akan memberitahu apakah hasil pendidikan sesuai dengan yang direncanakan. Sebagaimana sudah

disebut secara implisit di atas, bahwa pada hakekatnya sebuah perencanaan dibuat dalam rangka mengubah "situasi pendidikan saat ini" (dalam kenyataan) menuju ke "situasi pendidikan yang diharapkan" di masa mendatang. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang harus dipahami, yaitu kebijakan, perencanaan dan program pendidikan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut ini, bahwa pengelolaan pendidikan baik itu pada tataran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pada tingkat kabupaten/kota merupakan usaha terencana dalam mengelola seluruh sumber daya pendidikan oleh beberapa orang dalam satu sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara makro atau mikro. Pengelolaan pendidikan merupakan hal yang penting dalam sebuah pengelolaan lembaga pendidikan. Isu-isu dalam pengelolaan pendidikan secara umum terdapat empat permasalahan pokok dalam pendidikan di Indonesia, yakni mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan layanan pendidikan bermutu, relevansi, efektivitas dan efisiensi. Menurut Permendiknas No.19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, ada enam hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Enam hal tersebut yaitu : Perencanaan Program, Pelaksanaan Program, Pengawasan dan Evaluasi Program, Kepemimpinan Sekolah, Sistem Informasi Manajemen, dan Penilaian Khusus.

Daftar Pustaka

1. Abraham, David. (1999). *Quality Control: New Approach in Our Business*. New York: McMillan, Co.
2. Baharuddin, et.al. (2010). *Teori Belajar & Pembelajaran*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
3. Bhutankar, David. (2000). *Deregulation Cost of Education Programs in Development Countries*. <http://www.webster@bhutankar.bhutan.ac.uk>.
4. Chaube, S.P & Chaube,A. (1993). *Comparative Education*. Delhi. Vikas Publishing House.
5. Devidson, Roger H. (1989). *Breaking Up Those Cozy Trangle: An Impossible Dreams*. New York: Pranger, Inc.
6. Education in The Russian Federation. (2005). Available at; <http://www.wes.org>. (Online). 22 April 2012.
7. Fathurrochman, I., Budiman, D. A., Alamsyahril, & Kristiawan, M. (2019). *Revitalization Management Of Islamic Boarding School Preventing The Radicalism*. *Restaurant Business*, (10), 495–505. Retrieved from <https://journals.eduindex.org/index.php/rb/article/view/9462>.
8. Fattah, Nanang. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
9. Fitria, H., Kristiawan, M., & Rasyid, A. (2019). *The Educational Character on Instruction*. *Opción*, Año 35, Especial No.21 (2019): 964-979
10. General Overview of the Structure of Russian Education System. (2011). Paper Presented on AACRAO Conference, March 15, 2011
11. Ginandjar, Kartasasmita. (1993). *Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam PJPT-II*. Surabaya: Gema Kliping.
12. Hellen, C.R. (2001). *Educational Programs of Indonesia: Polecy and Practice*. <http://www.ind.edu/~wwwitr/docs/hellen/indec.html>
13. Hendradipura, Amin dan M. Lukmanul Hakim, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Prospektifa OPOCI*, <http://www.beasiswaopoci.wordpress.com>
14. Herabuddin, (2009). *Administrasi & Supervisi Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
15. Indonesia. Available at: <http://www.wikipedia.org>. (Online). 22 April 2012.
16. Irmayani, H., Wardiah, D., & Kristiawan, M. (2018). *The Strategy of SD Pusri In Improving Educational Quality*. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(7).
17. Khairudin, Mahfud Junaidi dkk, (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, Pilar Media, Jogjakarta.
18. Khasanah, U., Kristiawan, M., & Tobari. (2019). *The Implementation of Principals' Academic Supervision In Improving Teachers' Professionalism in the State Primary Schools*. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(8).
19. Kristiawan, M., & Elnanda, D. (2017). *The Implementation of Authentic Assessment in Cultural History of Islamic Subject*. *Al-Ta lim Journal*, 24(3), 266-276.
20. Kristiawan, M., Jumeldi, A., Ahmad, S., & Asvio, N. (2016). *The Implementation Of Affective Assessment For Islamic Education In High School 1 Pariangan*. *Research Journal of Social Sciences*, 9(4), 1-8.

21. Lasmawan, W. (2000). Pengelolaan dan Operasionalisasi Pembelajaran IPS yang Ramah Lingkungan. (Makalah). Program Pascasarjana UPI Bandung.
22. Livingston, Kay and McCall, Jm. (2005). "Evaluation; Judgemental or Developmental?". *European Journal of Teacher Education*. 28 (2), 165-178.
23. Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
24. Mulyasa, Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah, (2011). Jakarta: Bumi Aksara.
25. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional, (2003). Bandung: Remaja Rosdakarya.
26. National Information Center on Academic Recognition and Mobility, Ministry of Education and Science of the Russian Federation. (2010). Available at; <http://www.Russianenic.ru>. (Online). 22 April 2012.
27. Nur, Agustiar Syah. (2001). *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung. Lubuk Agung.
28. Peraturan BSNP No. 012/XII tahun 2011 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2011/2012.
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. No. 59 Tahun 2011 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah / Madrasah dan Ujian Nasional.
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
31. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
32. Public Council of Ministry Education and Science Drawxs the Botton Line of Experimental Course " Basics of Religion and Secular Ethics". (2011). Available at; <http://eng.mon.gov.ru>. (Online). 21 April 2012.
33. Public Council of Ministry of Education and Science Draws the Bottom Line of Experimental Course' Basic of Religion and Secular Ethics'. Available at; <http://www.Eng.mon.gov.ru>. (Online). 21 April 2012.
34. Rahadian, A.H, Dr. Ir. M.Si. (2012). Materi Kuliah Kebijakan Publik (Modul Kuliah) Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi STIAMI, Jakarta.
35. Rusia. Available at: <http://www.wikipedia.org>. (Online). 22 April 2012.
36. Russian Education System. (2010). Available at; <http://www.rusianenic.ru>. (Online). 22 April 2012.
37. Russian School; Structure of System, Age of Entry and Certificates. 2010). Available ata; <http://www. Justlanded.com>. (Online) 19 Mei 2012.
38. Sasongko, Rambat Nur dan Bambang Sahono. (2016). *Inovasi Manajemen Sekolah*, Jakarta : Shanny Publishing.
39. Sugeng Listyo Prabowo, (2008). *Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah*, UIN Press.
40. Sumantri, Mulyani. Dan Kuntadi, Iwa. (2011). *Perbandingan Kurikulum Sekolah Dasar Antar Negara*. Manuscript untuk diterbitkan oleh Puskubruk, Jakarta.
41. Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar. (1993). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Rosdakarya.
42. Team Depdiknas, (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
43. Tilaar, H.A.R. (1999). *Pendidikan dan Masyarakat Madani: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
44. Tilaar. H.A.R, (2006). *Standarisasi Pendidikan Nasional; Suatu Tinjauan Kritis*, Jakarta: Rineka Cipta.
45. Tim Penyusunan Kamus, (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II)*; Jakarta: PN. Balai Pustaka). Republik Indonesia.
46. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
47. UNESCO (2019). *The EFA Assesment Country Report; Russian Federal*. (tersedia).www.unesco.org/education (Online). 15 Maret 2012.
48. UNESCO. (2011). *World Data on Educatio- Russian Federation*. (tersedia).www.unesco.org/education (Online). 15 Maret 2012.
49. Wahab, Azis. (1999). *Otonomi Pendidikan: Pokok-pokok Pikiran Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional (makalah)*. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Bandung.